

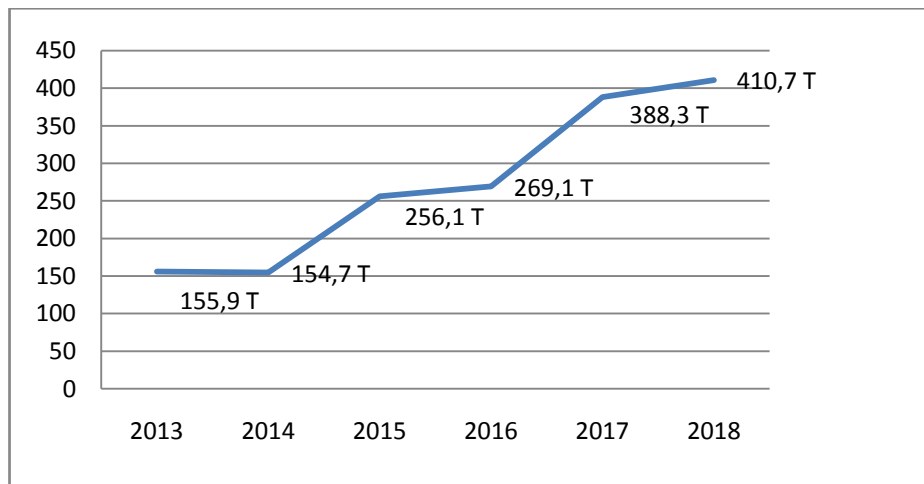
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini, tak heran apabila setiap tahun anggaran untuk proyek infrastruktur selalu naik, salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan proyek infrastruktur adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendapatan APBN itu sendiri berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, dalam pembelanjanya APBN di bagi beberapa sektor salah satunya adalah bidang infrastruktur, dengan tujuan untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi, membangun jalur logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah yang strategis.

Gambar 1.1 Anggaran Infrastruktur dalam APBN



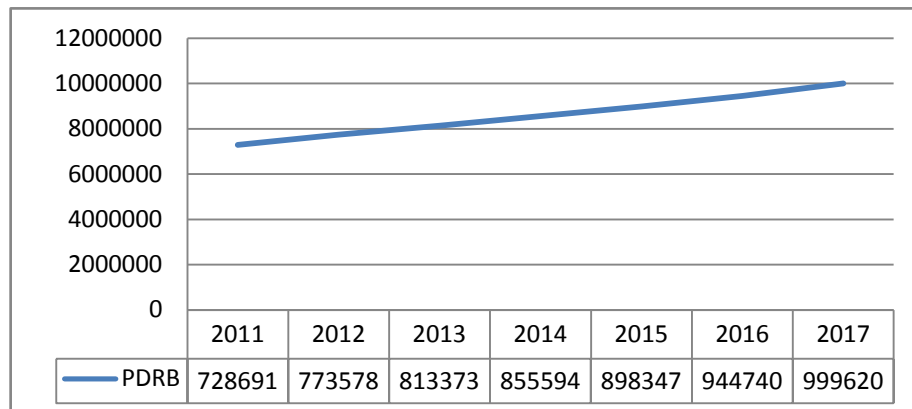
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2018.

Pengembangan infrastruktur tersebut dilakukan pemerintah dengan menetapkan kebijakan anggaran setiap tahunnya guna menunjang perbaikan, pembuatan dan pengelolaan infrastruktur. Pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 410,7 triliun di dalam APBN 2018.

Dibandingkan lima tahun sebelumnya, anggaran tahun ini paling tinggi. Pada 2013 anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp 155,9 triliun, yang kemudian turun menjadi Rp 154,7 triliun pada 2014. Selanjutnya, setelah pemerintahan berganti, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, anggaran naik menjadi Rp 256,1 triliun pada 2015 , Rp 269,1 triliun pada 2016 dan tahun 2017, anggaran infrastruktur kembali melonjak drastis menjadi Rp 388,3 triliun.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 pasal 1 ayat 2 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Subbidang Infrastruktur Irigasi, Subbidang Air Minum, Subbidang Sanitasi, dan Subbidang Perumahan/pemukiman. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dalam upaya mendorong percepatan tersebut penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijaksana dan lebih fokus pada pos-pos anggaran yang mendukung akumulasi kapital baik infrastruktur keras maupun human capital dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kebutuhan wilayah (Hermansyah, 2014).

Gambar 1.2 Perkembangan PDRB atas harga konstan 2011-2017 (Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah Tahun 2018.

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dikarenakan terjadinya lonjakan pendapatan nasional yang cukup tajam di setiap tahun. Karena terjadinya peningkatan pendapatan setiap tahun dapat membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka, membantu merumuskan kebijakan pemerintah dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga akan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Pengembangan infrastruktur yang kurang optimal akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengendalian dan pengawasan pembangunan yang minim menjadi penyebab buruknya proyek pembangunan infrastruktur saat ini. Menurut Warsilan (2015), masalah tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan infrastruktur ke arah yang lebih baik. Melakukan mengendalikan, pengawasan serta evaluasi pada proyek pembangunan

infrastruktur akan menciptakan sektor-sektor lain sehingga akan mempengaruhi iklim ekonomi.

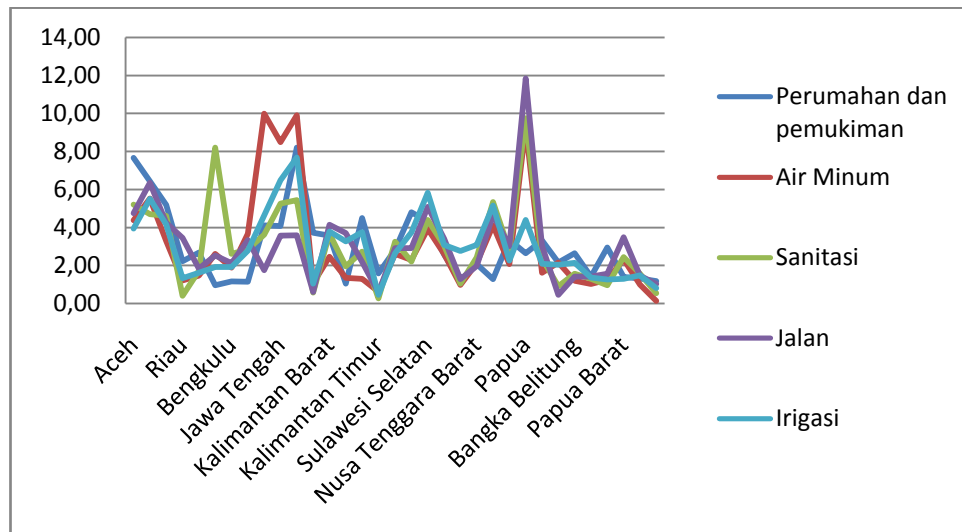
Adanya keterkaitan yang sangat erat antara perkembangan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur akan meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan yang akan berdampak berkurangnya daerah-daerah tertinggal serta terbukanya akses ekonomi masyarakat di daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat diartikan infrastruktur merupakan jantung dari sebuah perekonomian, tanpa adanya infrastruktur maka sebuah perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah memiliki anggaran tersendiri khusus untuk infrastruktur.

Menurut Fatimah (2018), Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Salah satu peran tersebut pemerintah diharapkan menjadi mobilisator pembangunan yang strategis sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban dunia usaha. Prioritas yang pertama, pemerintah meminta pemda dalam memberikan fasilitas yang layak agar usaha

dapat tetap berjalan dengan baik. Prioritas yang kedua adalah peningkatan proyek infrastruktur untuk memperbaiki perekonomian sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selain akan menyerap tenaga kerja proyek ini juga dapat membuat laju perekonomian semakin cepat. Prioritas ketiga adalah upaya pemerintah pusat dan daerah untuk membantu masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah atau di bawah garis kemiskinan oleh karena itu pemerintah pusat maupun daerah memiliki anggaran tersendiri khusus untuk pengembangan infrastruktur.

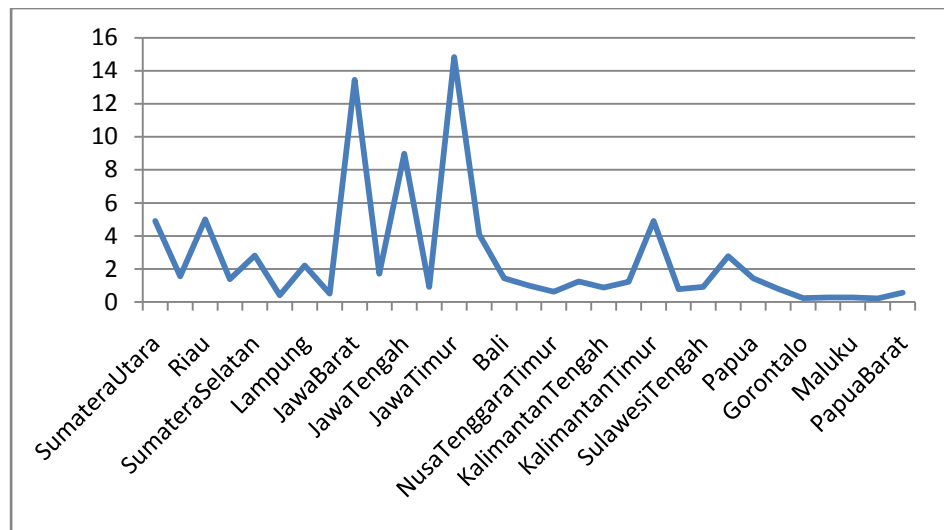
Gambar 1.3 Persentase Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2015



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) diolah Tahun 2015.

Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa persentase tertinggi penggunaan DAK terdapat pada Provinsi Jawa Barat sebesar, Jawa Timur dan Papua. Provinsi papua menyerap dana paling tinggi dibanding provinsi lain, hal ini terlihat adanya kecenderungan pemerintah untuk memajukan suatu daerah bukan hanya untuk kepentingan produksi tetapi pada daerah yang tertinggal juga.

Gambar 1.4 Persentase Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015.

Terlihat pada Gambar 1.4 provinsi dengan pendapatan PDRB terbesar yaitu Jawa Timur sebesar 14,8 persen, Jawa Barat sebesar 13,4 persen dan Jawa Tengah sebesar 8,9 persen. Artinya hampir $\frac{1}{4}$ PDRB Indonesia dihasilkan dari Pulau Jawa. Sedangkan Provinsi Papua dengan nilai DAK tertinggi hanya mampu menghasilkan PDRB 1,5 persen dari total PDRB di seluruh provinsi di Indonesia.

Infrastruktur jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Dalam upaya penggerak perekonomian jalan berfungsi sebagai percepatan distribusi pendapatan, baik dalam suatu wilayah, antar maupun keluar wilayah. Apabila jalan rusak masyarakat akan enggan mengirim produktivitasnya, pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan tidak jadi didapatkan, sehingga masyarakat hanya menghasilkan produksinya untuk konsumsi sendiri / tidak ada kemajuan ekonomi.

Dalam upaya peningkatan irigasi untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melakukan berbagai macam upaya seperti kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, kegiatan peningkatan jaringan irigasi dan pembuatan baru jaringan irigasi. Kegiatan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar namun kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dampaknya kondisi sanitasi Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Dalam pengembangannya pemerintah melakukan pembangunan prasarana sanitasi pada kawasan permukiman padat di perkotaan, permukiman padat pusat pertumbuhan di daerah, serta pelayanan sanitasi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial utama daerah, meliputi : Pembangunan prasarana air limbah dan Pembangunan prasarana persampahan.

Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti bidang air minum, mengharuskan Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam rangka peningkatan pelayanan / penyediaan air minum, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera.

Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah, pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efisien serta dimanfaatkannya DAK sebagai Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagian oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier.

Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjatidiri, mandiri dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan dan kawasan pemukiman agar kawsan mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah uang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah indonesia.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan bantuan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat

demokrasi, otonomi daerah dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh banyak peneliti, namun penelitian ini berbeda dengan pada umumnya. Sehingga penelitian ini bisa dianggap penting karena variabel independen Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi dan Perumahan/Pemukiman) menggunakan data Dana Alokasi Khusus atau pengeluaran pemerintah (*Government Expenditures*) guna menunjang perbaikan infrastruktur yang nantinya akan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, sanitasi, jaringan air minum dan perumahan/pemukiman sangatlah penting dalam rangka meningkatkan prekonomian masyarakat di suatu wilayah. Prasarana infrastruktur dibutuhkan tidak saja oleh rumah tangga namun juga oleh industri. Sehingga peningkatan prasarana infrastruktur diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan prasarana yang mencukupi mempunyai keuntungan yang lebih besar dalam usaha menarik investasi untuk masuk ke daerahnya serta akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah yang memiliki prasarana yang minim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat perlunya penelitian terkait biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis ingin melihat hubungan antara infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari *Government Expenditures*. Apakah dengan meningkatkan dana alokasi pemerintah untuk infrastruktur akan sebanding dengan presentase pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut. Berdasarkan

pernyataan tersebut maka peneliti ingin menganalisis tentang “ANALISIS PENGARUH *GOVERNMENT EXPENDITURES* INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh DAK infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh DAK infrastruktur Irigasi terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh DAK infrastruktur sanitasi terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh DAK infrastruktur air minum terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Bagaimana pengaruh DAK infrastruktur perumahan/pemukiman terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh DAK infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui pengaruh DAK infrastruktur Irigasi terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Untuk mengetahui pengaruh DAK infrastruktur sanitasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Untuk mengetahui pengaruh DAK infrastruktur air minum terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Untuk mengetahui pengaruh DAK infrastruktur perumahan/pemukiman terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengetahuan, khususnya mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan karya ilmiah, sehingga dapat bermanfaat dalam mengembangkan diri.
4. Dapat dipergunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempergunakan konsep dan gagasan baru yang dihasilkan penelitian mengenai pembangunan infrastruktur saat ini.

